



Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Apbd Kota Medan (Studi Kasus Tahun 2019-2023)

Alika Putri¹, Magdalena Mori Sihotang², Dwi Cahyono³, Rizki Hamdani⁴

alikaputri2909@gmail.com¹, magdalenamori696@gmail.com², dwicahyono@unmuhjember.ac.id³, rizki.hamdani@uii.ac.id⁴

^{1,2} Universitas Negeri Medan

³ Universitas Muhammadiyah Jember

⁴ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Article Info

Article history:

Received Desember 22th, 2024

Revised Januari 20th, 2025

Accepted Januari 26th, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas

Efisiensi

APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD Kota Medan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini menganalisis data sekunder dari laporan realisasi APBD Kota Medan periode 2019–2023 dengan teknik rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pengelolaan anggaran daerah serta menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of Medan City's APBD management as an indicator of local government performance. Using a quantitative descriptive method, this research analyzes secondary data from the Medan City APBD realization report for the 2019-2023 period using the effectiveness ratio and efficiency ratio techniques. The results of this study are expected to provide a comprehensive picture of the quality of regional budget management and present recommendations to improve accountability and transparency in regional financial management to support the achievement of development goals.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Alika Putri

Universitas Negeri Medan

alikaputri2909@gmail.com

Latar Belakang

Efektivitas, menurut Mahmudi (2005:92), didefinisikan sebagai hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi atau bantuan output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efisiensi mengacu pada hubungan antara input dan output. Pengukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan dapat digunakan oleh organisasi efisiensi merujuk pada sejauh mana perangkat pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana

keuangan operasional pemerintah daerah yang mencerminkan batas maksimal pengeluaran guna membiayai berbagai kegiatan serta proyek di daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, APBD juga mencantumkan perkiraan serta sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu elemen krusial dalam pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan, diharapkan dapat mengelola anggaran secara efektif dan efisien guna mencapai target pembangunan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti rendahnya tingkat penyerapan anggaran, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Di Kota Medan, permasalahan ini dapat berdampak pada kualitas layanan publik, ketimpangan pembangunan, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran di Pemerintah Kota Medan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Dengan menganalisis data realisasi anggaran dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kualitas pengelolaan anggaran di daerah tersebut.

A. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran (*budget*) merupakan rencana keuangan yang mencerminkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dalam penyusunannya, anggaran mencerminkan harapan atau target tertentu yang diinginkan. Oleh karena itu, ketika anggaran diimplementasikan, pencapaiannya menjadi penting, karena jika tidak terpenuhi, hal ini dapat mengecewakan pihak yang menyusunnya (Jones & Pendlebury, 2010).

Berbeda dengan konsep anggaran (*budget*), penganggaran (*budgeting*) mengacu pada proses pengalokasian sumber daya keuangan yang terbatas guna membiayai berbagai kebutuhan organisasi, seperti negara atau pemerintah daerah, yang umumnya memiliki kebutuhan belanja yang tidak terbatas. Proses penganggaran berlangsung secara berkelanjutan, mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemeriksaan. Maka dari itu penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya keuangan dalam entitas sektor publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga non-profit lainnya.

Medan adalah salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Ini pasti menempatkan kota ini di tempat yang strategis dalam ekonomi regional. Pembangunan kota, peningkatan kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada anggaran yang dikelola dengan baik. Berbagai bidang pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sangat dipengaruhi oleh APBD. Pada periode ini, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama bagi pemerintah kota Medan. Anggaran untuk pemerintahan daerah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dokumen keuangan tahunan yang menunjukkan kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. APBD adalah alat penting untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien.

APBD terdiri dari 3 komponen utama yaitu:

1. Pendapatan daerah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah
2. Belanja daerah, yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, biaya tidak terduga, dan transfer.
3. Pembiayaan daerah, yang terdiri dari pembiayaan yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mengurangi deficit, atau memanfaatkan lebih anggaran.

Realisasi anggaran

Menurut Rukayah et al. (2017), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang merangkum sumber, alokasi, serta pemanfaatan dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini juga menampilkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan

dengan realisasi anggaran dalam suatu periode pelaporan tertentu. Sementara itu, Abdul (2017:98) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan anggaran tidak terealisasi adalah kegagalan dalam perencanaan.

B. Efisiensi pengelolaan APBD

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi adalah keterkaitan antara *input* dan *output*. Tingkat efisiensi diukur dari sejauh mana barang dan jasa yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Input mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran, sedangkan output merupakan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Efisiensi menunjukkan seberapa banyak output yang dapat dihasilkan dengan input yang tersedia. Dedi dan Ayuningtyas (2010) juga menjelaskan bahwa efisiensi menggambarkan hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan dalam suatu kegiatan dengan sumber daya (input) yang digunakan.

C. Efektivitas dalam pengelolaan APBD

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target suatu kebijakan. Konsep efektivitas mengacu pada keterkaitan antara hasil yang diperoleh dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut Hadi dalam Sukirno (2000), efektivitas merupakan pencapaian akhir dari suatu kegiatan operasional yang telah memenuhi tujuannya, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu yang telah ditentukan. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja}} \times 100\%$$

Efektifitas belanja

Efektifitas belanja didefinisikan sebagai perbandingan antara pengeluaran yang direncanakan dan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran. Tujuan perhitungan efektifitas pendapatan dan belanja adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemda serta membantu evaluasi kinerja anggaran. Perhitungan ini bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan bertanggung jawab.

Efektifitas pendapatan

Efektifitas pendapatan adalah perbandingan antara pendapatan yang diterima dan yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa baik pemerintah dapat menetapkan dan memenuhi target pendapatan. Pengukuran ini juga membantu dalam merencanakan rencana untuk meningkatkan pendapatan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas Pemda dengan memastikan bahwa pendapatan sesuai dengan target.

D. Faktor-Faktor Efisiensi dan Efektivitas APBD

Beberapa komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk perencanaan, administrasi, sumber daya manusia (SDM). Semua ini berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas APBD.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi APBD

a. Perencanaan Anggaran

Perbedaan antara anggaran yang diajukan dan yang disetujui, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu dini, perencanaan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan, serta pembekuan anggaran akibat ketiadaan data pendukung.

b. Administrasi

Perubahan kebijakan pemerintah, pengesahan anggaran yang tertunda, dan waktu penyusunan dan penelahan anggaran yang terlalu singkat.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan, beban tugas yang tinggi pada panitia pengadaan, ketakutan pejabat dalam melaksanakan pengadaan akibat pemberitaan penangkapan terkait dugaan korupsi, keengganan pejabat menjadi bagian dari tim pengadaan

karena risiko pekerjaan yang tidak sebanding dengan apresiasi yang diterima, serta belum diterbitkannya SK penunjukan untuk kegiatan swakelola.

Faktor yang mempengaruhi efektifitas APBD

Lima faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi ketepatan waktu dan akurasi laporan, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, tingkat kompleksitas anggaran, keterlibatan manajemen puncak, serta peran departemen anggaran.

E. Jenis Sistem Penganggaran Publik

A. Line Item Budgeting

Line-item budgeting merupakan metode penyusunan anggaran yang berfokus pada sumber pendapatan serta alokasi dana untuk berbagai jenis pengeluaran. Sebagai salah satu sistem anggaran tertua, pendekatan ini memiliki banyak kelemahan dan sering disebut sebagai "*traditional budgeting*." Meskipun demikian, *line-item budgeting* tetap banyak digunakan karena dianggap praktis dan mudah diterapkan (Wildavsky, 2000).

B. Incremental Budgeting

Incremental budgeting merupakan sistem penganggaran yang memungkinkan penyesuaian terhadap belanja dan pendapatan selama tahun berjalan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.

C. Planning Programming Budgeting System

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan mendasar dalam *line-item budgeting*, muncul beberapa sistem penganggaran baru, seperti *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*, *Zero Based Budgeting (ZBB)*, dan *Performance Budgeting*. PPBS sendiri merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran dalam satu kesatuan yang utuh. Sistem ini mencakup identifikasi tujuan organisasi, analisis potensi permasalahan, serta pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang diperlukan. Selain itu, PPBS juga mempertimbangkan dampak keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa depan.

D. Zero Based Budgeting (ZBB)

Zero Based Budgeting (ZBB) lahir sebagai upaya untuk merasionalisasi proses penyusunan anggaran. Dalam sistem ini, terdapat konsep unit keputusan (*decision units*) yang menghasilkan berbagai pilihan paket anggaran sebagai dorongan untuk menciptakan anggaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan alokasi dana. Namun, dalam penerapannya, ZBB memerlukan banyak dokumen, data, serta sistem manajemen informasi yang canggih, yang sering kali menjadi kendala utama dalam implementasinya.

E. Performance Budgeting

Performance budgeting, atau anggaran berbasis kinerja, adalah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil (output) organisasi serta memiliki keterkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategisnya. Dalam pendekatan ini, sumber daya dialokasikan berdasarkan program, bukan hanya pada unit organisasi, dengan pengukuran output sebagai indikator kinerja. Selain itu, hubungan antara biaya dan hasil organisasi menjadi bagian penting dalam dokumen anggaran. Dengan kata lain, *performance budgeting* menyusun anggaran berdasarkan beban kerja (*workload*) dan biaya per unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur ini dimulai dari pencapaian tujuan dan program, dengan anggaran yang berfungsi sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran ini memastikan keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, sehingga anggaran mencerminkan rencana kerja organisasi.

F. Medium Term Budgeting Framework (MTBF)

Medium Term Budgeting Framework (MTBF) merupakan rancangan strategis dalam kebijakan anggaran belanja suatu unit organisasi. Rancangan ini memberikan tanggung jawab lebih besar kepada unit organisasi dalam menentukan alokasi serta pemanfaatan anggaran

pembangunan. Keberhasilan MTBF bergantung pada proses pengambilan keputusan anggaran secara keseluruhan yang berlandaskan skala prioritas. Dalam sistem MTBF, aspek anggaran ditetapkan melalui pendekatan *top-down*, sementara perkiraan biaya diajukan dengan pendekatan *bottom-up*, kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan sumber daya yang tersedia..

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan suatu variabel dalam penelitian tanpa melakukan pengujian terhadap hipotesis tertentu. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data numerik yang tersedia, tanpa melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis (Sulistiyawati, Wahyudi, & Trimuryono, 2022).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan APBD Kota Medan dimulai dari tahun 2019 hingga 2023 yang dapat diakses melalui website resmi pemerintah daerah, serta dokumen lain seperti laporan realisasi anggaran. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan mengakses, mengunduh, dan mencatat informasi yang relevan untuk dianalisis. Dengan membandingkan data selama lima tahun, dapat terlihat seberapa besar variabel (realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan alokasi anggaran pendapatan daerah) mempengaruhi tingkat rasio efisiensi dan efektivitas APBD.

Populasi yang diambil dari seluruh data APBD Kota Medan dalam periode tertentu (5 tahun terakhir). Sampel yang diambil adalah laporan realisasi anggaran APBD Kota Medan dalam periode tertentu (5 tahun terakhir). Metrik ini digunakan untuk menilai tingkat efektivitas suatu perusahaan atau organisasi dalam memanfaatkan sumber daya guna menghasilkan pendapatan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah pengeluaran terhadap pendapatan yang diperoleh. Metrik ini digunakan untuk menilai kinerja suatu entitas, khususnya pemerintah daerah, dalam memenuhi sasaran pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini mengukur perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran yang dirancang berdasarkan potensi riil daerah.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Rasio Efisiensi dan Efektivitas APBD Kota Medan

1. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dalam APBD berfungsi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara optimal dalam memberikan layanan publik. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan apakah penggunaan anggaran sudah berjalan secara efisien dan efektif. Jika anggaran yang dialokasikan tidak terserap dengan baik atau digunakan secara berlebihan tanpa memberikan hasil yang proporsional, maka hal ini menandakan adanya ketidakefisienan. Selain itu, rasio efisiensi memiliki peran krusial dalam perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya, sehingga alokasi dana dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan ketentuan:

- Jika lebih dari 100%, maka dianggap tidak efisien.
- Jika berada dalam rentang 90% hingga 100%, maka tingkat efisiensinya tergolong kurang optimal.
- Jika mencapai 80% hingga 90%, maka dapat dikatakan cukup efisien.
- Jika berkisar antara 60% hingga 80%, maka dinilai efisien.
- Jika kurang dari 60%, maka tergolong sangat efisien.

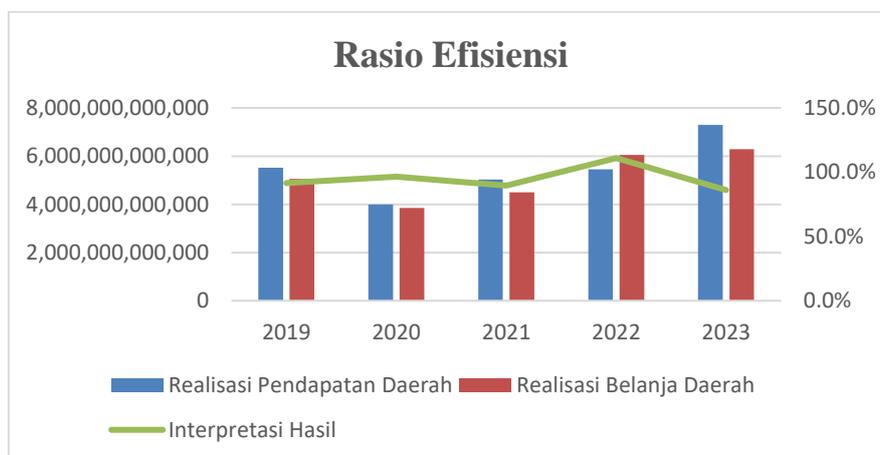
Dengan menggunakan perbandingan diatas, berikut ini merupakan hasil dari penerapannya.

EFISIENSI APBD PEMKO MEDAN			
Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Interpretasi Hasil
2019	5.518.772.179.306	5.059.387.661.308	91,7%
2020	3.988.761.485.152	3.854.742.410.737	96,6%
2021	5.023.080.346.608	4.499.145.144.312	89,6%
2022	5.449.340.586.723	6.047.219.172.842	111,0%
2023	7.296.157.352.009	6.282.441.543.317	86,1%

Gambar 1. Efisiensi APBD Pemerintahan Kota Medan

Dalam lima tahun terakhir, efisiensi penggunaan APBD Kota Medan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, rasio efisiensi mencapai 91,7%, yang tergolong “kurang efisien” karena masih ada ketidakseimbangan antara penggunaan anggaran dan hasil yang diperoleh. Tahun 2020 mencatat efisiensi tertinggi sebesar 96,6%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran dimanfaatkan secara optimal, kemungkinan karena fokus utama pada penanganan pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, efisiensi menurun menjadi 89,6% dan masuk dalam kategori “cukup efisien”, yang mungkin disebabkan oleh anggaran yang tidak terserap sepenuhnya akibat perubahan kebijakan pasca-pandemi. Situasi berubah drastis pada tahun 2022, di mana rasio efisiensi melonjak menjadi 111,0%, mengindikasikan bahwa pengeluaran melebihi anggaran yang telah direncanakan. Hal ini bisa disebabkan oleh tambahan belanja untuk pemulihan ekonomi atau kurangnya perencanaan anggaran yang efektif. Pada tahun 2023, efisiensi kembali menurun menjadi 86,1%, menunjukkan bahwa ada anggaran yang tidak digunakan secara optimal, kemungkinan karena adanya kendala dalam pelaksanaan program. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa efisiensi APBD Kota Medan masih belum stabil.

Pada intinya Efisiensi penggunaan APBD Kota Medan dalam lima tahun terakhir mengalami naik-turun. Tahun 2020 mencatat efisiensi tertinggi (96,6%) akibat fokus pada penanganan pandemi, sementara tahun 2022 melonjak drastis (111,0%) karena pengeluaran melebihi anggaran yang direncanakan. Sebaliknya, tahun 2019, 2021, dan 2023 menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih rendah, mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, efisiensi APBD Kota Medan masih belum stabil dan memerlukan perbaikan dalam perencanaan serta pengelolaannya.



Gambar 2. Efisiensi penggunaan APBD Kota Medan dalam lima tahun terakhir

2. Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai tujuan serta sasaran yang telah direncanakan dalam anggaran. Rasio ini lebih menitikberatkan pada hasil atau dampak yang diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang telah digunakan. Dengan kata lain, efektivitas mengukur apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat sesuai harapan. Jika rasio efektivitas melebihi 100%, berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran

yang telah direncanakan, yang dapat menunjukkan adanya perencanaan yang kurang tepat atau indikasi pemborosan. Sebaliknya, jika rasionya terlalu rendah, anggaran yang sudah dialokasikan tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga program yang direncanakan tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, rasio efektivitas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Alokasi Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan ketentuan:

- Jika lebih dari 100%, maka dikategorikan sebagai sangat efektif.
- Jika berada dalam rentang 90% hingga 100%, maka dianggap efektif.
- Jika mencapai 80% hingga 90%, maka dapat dikatakan cukup efektif.
- Jika berkisar antara 60% hingga 80%, maka termasuk kurang efektif.
- Jika kurang dari 60%, maka dinilai tidak efektif.

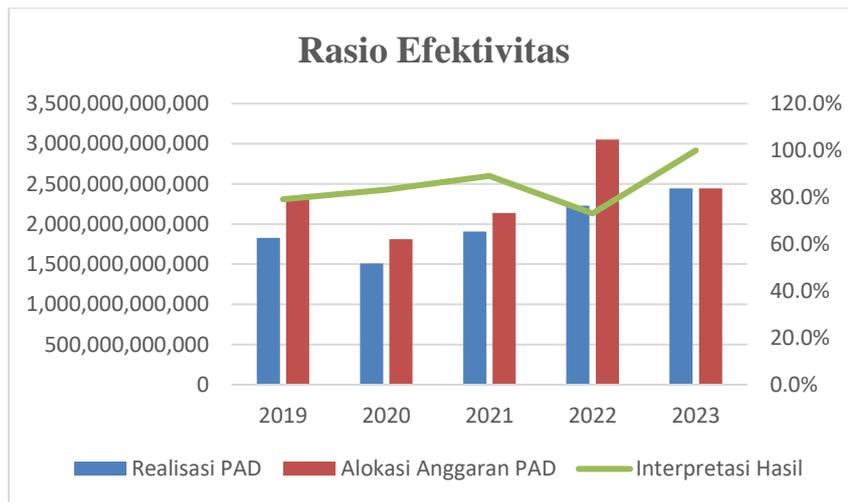
Dengan menggunakan perbandingan diatas, berikut ini merupakan hasil dari penerapannya.

EFEKTIVITAS APBD PEMKO MEDAN			
Tahun	Realisasi PAD	Alokasi Anggaran PAD	Interpretasi Hasil
2019	1.829.669.955.348	2.312.760.384.058	79,1%
2020	1.509.831.081.747	1.813.909.461.511	83,2%
2021	1.906.512.189.047	2.139.239.943.474	89,1%
2022	2.230.554.495.747	3.050.594.560.414	73,1%
2023	2.442.782.732.669	2.442.782.732.669	100,0%

Gambar 3. Efektivitas APBD Pemerintahan Kota Medan

Dalam lima tahun terakhir, rasio efektivitas APBD Kota Medan mengalami perubahan yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2019, efektivitas anggaran tercatat sebesar 79,1%, yang tergolong "*kurang efektif*". Kemudian, pada tahun 2020, angka ini meningkat menjadi 83,2%, menandakan bahwa penggunaan anggaran mulai masuk dalam kategori "*cukup efektif*". Tren positif berlanjut di tahun 2021 dengan rasio mencapai 89,1%, hampir memasuki kategori "*efektif*". Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan cukup tajam ke 73,1%, yang kembali masuk dalam kategori "*kurang efektif*". Meskipun sempat mengalami penurunan, pada tahun 2023, rasio efektivitas melonjak drastis hingga 100%, menandakan penggunaan anggaran telah efektif sepenuhnya. Secara umum, efektivitas APBD mengalami naik-turun selama periode ini, dengan pencapaian terbaik pada tahun 2023 dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2022.

Efektivitas APBD Kota Medan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi pada tahun 2020 (83,2%) dan 2021 (89,1%), namun menurun tajam di tahun 2022 (73,1%). Pada tahun 2023, efektivitas mencapai 100%, menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal. Secara keseluruhan, efektivitas APBD tidak stabil, dengan pencapaian terbaik di tahun 2023 dan penurunan terbesar di tahun 2022.



Gambar 4. Efektivitas APBD Kota Medan Dalam Lima Tahun Terakhir Meningkat

Solusi yang dapat diberikan

Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan rasio efisiensi belanja dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal serta memastikan penggunaannya lebih efektif. Selain itu, pertumbuhan belanja harus disesuaikan dengan laju pertumbuhan pendapatan agar keuangan daerah tetap stabil dan meningkat di masa depan. Dalam pengelolaan anggaran belanja operasi dan modal, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi belanja, sehingga anggaran digunakan secara lebih optimal. Selain itu, kebijakan anggaran harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah, diperlukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah, termasuk retribusi parkir dan sektor lainnya. Kurangnya transparansi dan manajemen yang kurang optimal sering menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan daerah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD harus ditingkatkan, misalnya dengan menerapkan *e-budgeting* serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan riil, dilakukan dengan efisien, serta diawasi dengan ketat untuk mencegah penyimpangan dan korupsi.

B. Pendekatan yang digunakan Pemerintah Kota Medan Dalam Menyusun Laporan APBD Kota Medan

Dalam penyusunan laporan APBD Kota Medan, pendekatan yang umum digunakan adalah *Performance Budgeting* atau anggaran berbasis kinerja. Sistem ini menitikberatkan pada keterkaitan antara alokasi anggaran dan hasil yang ingin dicapai, sehingga setiap program atau kegiatan yang mendapatkan pendanaan harus memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan metode ini, pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada pencapaian target pembangunan daerah. Melalui *Performance Budgeting*, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, sistem ini juga mendukung evaluasi dan pengawasan keuangan daerah, karena setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan berdasarkan pencapaian yang telah ditetapkan.

Efektivitas sistem ini terlihat dari penampilan hasil kinerja yang direncanakan, serta adanya perbandingan antara realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, sehingga pemerintah dapat menilai keberhasilan dan meningkatkan kualitas pengelolaan APBD ke depan. Dengan demikian, APBD Kota Medan berperan tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat manajemen yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan pembangunan daerah secara efektif dan optimal.

Kesimpulan

Dalam lima tahun terakhir, pengelolaan APBD Kota Medan masih menunjukkan ketidakstabilan dalam aspek efisiensi dan efektivitas. Meskipun pada beberapa tahun tertentu anggaran telah dikelola dengan baik, terdapat pula periode di mana penggunaannya kurang optimal atau bahkan melebihi batas yang telah direncanakan. Selain itu, pencapaian pendapatan daerah masih menghadapi tantangan akibat kurangnya transparansi serta manajemen yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan APBD, seperti penerapan *e-budgeting* serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas agar anggaran dapat dialokasikan dengan lebih tepat. Dengan menerapkan *Performance Budgeting*, efektivitas anggaran dapat terus dipantau melalui perbandingan realisasi tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih optimal dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 74-87.
- Anggi, A. A. S. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104-115.
- Boedi, S. (2016). Analisis Kinerja Keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*, 2(2).
- Cellya, C., Agustin, C. U., Andika, L., Gaol, N. F. L., & Tamba, Y. A. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 524-532.
- Edtiyarsih, D. D., & Izzabillah, N. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 12(4), 368-382.
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan opd di kabupaten labuhanbatu. *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 39-47.
- Ikhsan, A. (2015). Akuntansi Sektor Publik.
- Kamaludin, K., & Dunggio, S. (2022). Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 01-17.
- Nasirwan, N., Lubis, A. Z. Y., Bhayangkara, A., & Sitanggang, E. M. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan: Studi Kasus pada BKAD Provinsi Sumatera Utara. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1349-1363.
- Paramita, A. (2020). Analisis dampak realisasi APBD terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 1(1).
- Pardede, L. P. N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi Pad Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 467-473.
- Pemerintah Kota Medan. (2019). *Laporan Realisasi APBD Kota Medan Tahun 2019*. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Diakses dari [https://portal.medan.go.id/storage/files/6/TAHUN_2020/Laporan_Realisasi_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_Tahun_2019.pdf]
- Pemerintah Kota Medan. (2020). *Laporan Realisasi APBD Kota Medan Tahun 2020*. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Diakses dari [https://portal.medan.go.id/storage/files/6/TAHUN_2021/Laporan_Realisasi_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_Tahun_2020.pdf]

-
- Pemerintah Kota Medan. (2021). *Laporan Realisasi APBD Kota Medan Tahun 2021*. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Diakses dari [https://portal.medan.go.id/storage/files/6/TAHUN_2022/Laporan_Realisasi_Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah_Tahun_2021.pdf]
- Pemerintah Kota Medan. (2022). *Laporan Realisasi APBD Kota Medan Tahun 2022*. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Diakses dari [https://portal.medan.go.id/storage/files/6/Perda_Dan_Perwal_Tahun_2023/Laporan_Keuangan_2022/Lk_Tahun_2022.Pdf]
- Pemerintah Kota Medan. (2023). *Laporan Realisasi APBD Kota Medan Tahun 2023*. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Diakses dari [https://portal.medan.go.id/storage/files/6/Dimensi_3_Tahun_2023/25_Informasi_CALK_Pemerintah_Daerah_2023.pdf]
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117-126.
- Shalsabila, C. A., & Kamilah, K. (2022). Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 117-125.
- Sharini, P. A., & Kurniawan, R. (2024). Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 875-883.
- Syafira, L., Harefa, K., Hidayat, O. S., & Habibi, M. R. (2022). Analysis of PAD, DAU, DAK, DBH and Capital Expenditures and their Effect on the Human Development Index of North Sumatra Province. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Akuntansi*, 8(1), 80-89.
- Vina, M. P. D., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 463-476.